

ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Dewi Aprida

Email : dw_aprida@yahoo.com

ABSTRACT

The main objective of this thesis is to test and analyze the causality between economics growth and the number of poor people in Indonesia. This study aims to answer the following three main questions: First, Is there any causality between economics growth with the number of national's poor people in Indonesia? Second, Is there any causality between economics growth with the number of Java island's poor people in Indonesia? And Third, Is there any causality between economics growth with the number of outside Java Island's poor people in Indonesia. The data by using in this thesis are secondary data which form in time series data (1996-2008). The tool of analysis that used in this research to see the direction of causality is Granger Causality-Test. Granger Causality-Test between economics growth and the number of poor people in Indonesia has shown that there's no causality between economics growth and the number of poor people in Indonesia. For economics growth and the number of national's poor people in Indonesia has shown that there's no causality among both. It is also for the answer of the second question, between the economics growth and the number of Java island's poor people in Indonesia there's no causality. And for the answer of the third question, between economics growth and the outside Java island's poor people in Indonesia there's also no causality. So that the reduction of the number of poor people was not affecting the increasing of economics growth.

Keywords: Economics Growth, The Number of Poor People, Poverty and Poverty Line

PENDAHULUAN

Indonesia pada pertengahan tahun 1997, pondasi perekonomian mengalami guncangan hebat akibat krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter sehingga memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terguncang hingga hanya mencapai 4,7 persen pada tahun 1997. Kemudian merosot lebih tajam menjadi sekitar -13,1 persen ditahun 1998. Krisis ini juga berimbas pada tingginya harga barang kebutuhan pokok yang melonjak drastis. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan yang pada masa sebelum krisis belum teratasi secara berarti.

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu masalah yang besar, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin jauh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia baik yang berada di perkotaan dan perdesaan dari tahun ketahun jumlahnya

beefluktuatif. Jumlah penduduk miskin dari pelita I hingga 1997 masih di dominasi oleh penduduk miskin yang berada di perdesaan dan sisanya di perkotaan. Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan dan perkotaan menurut Pulau untuk dua tahun terakhir yaitu periode 2007-2008, secara absolut penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang masih tersebar hanya di Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya pulau Jawa dan akibatnya berpengaruh besar terhadap jumlah penduduk miskin yang berada di pulau Jawa. Sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berturut-turut sebesar 8,00 juta dan 7,48 juta jiwa. Meskipun demikian persentase penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih besar dibandingkan di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Solow menjelaskan model pertumbuhan yang menekankan adanya investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Adanya investasi ini menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas dan hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustained development*) dalam jangka panjang. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

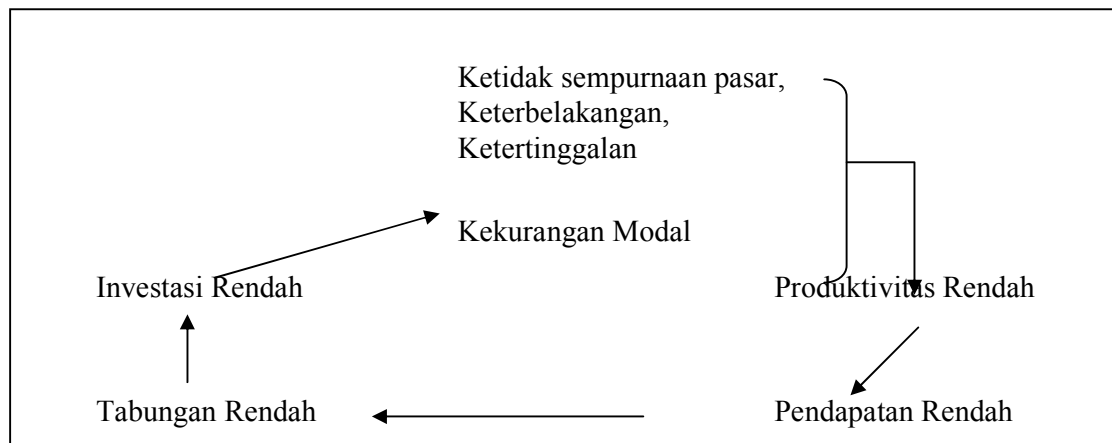
$$Y = A.F(K,L)$$

Di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas (Todaro dan Smith, 2003: 163).

Teori Kemiskinan

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidakmampuan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse,

ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: *a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)

Sumber: Kuncoro, 2000: 107

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut LPEM FEUI (2001) diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, penyebab dan pola waktu. Klasifikasi kemiskinan ini diuraikan sebagai berikut:

- i. Ditinjau dari tingkat keparahannya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi:
 1. Kemiskinan Absolut
 2. Kemiskinan Relatif
- ii. Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu:
 1. Kemiskinan Alamiah
 2. Kemiskinan Struktural
- iii. Ditinjau dari pola waktu kemiskinan dibagi dalam empat kelompok yaitu:
 1. Kemiskinan turun temurun (*persistent poverty*), yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.
 2. Kemiskinan siklikal (*cyclical poverty*), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
 3. Kemiskinan musiman (*seasonal poverty*), yaitu kemiskinan musiman, seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
 4. Kemiskinan sementara (*accidental poverty*), yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Bank Dunia (2006) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik berupa fisik atau sosial. Kekurangan fisik meliputi ketidakcukupan dalam bentuk dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan dalam nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sedangkan ketidakcukupan sosial meliputi hal-hal yang lebih sosial hal-hal yang lebih luas yaitu kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan inspirasi.

Pengukuran Kemiskinan dan Teori Garis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan ditentukan dari dimensi mana kemiskinan tersebut dilihat. Adapun dimensi dan ukuran kemiskinan menurut LPEM FEUI (2001) dibagi atas:

1. Konsumsi, ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah:
 - Indeks Headcount
 - Indeks Kedalaman Kemiskinan
 - Indeks Keparahan Kemiskinan
 - Garis Kemiskinan
2. Human Capital, ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah:
 - Tingkat keberhasilan kelompok 20% terbawah dalam menyelesaikan pendidikan dasar
 - Tingkat keberhasilan kelompok 20% terbawah dalam menyelesaikan pendidikan 9 tahun
 - Tingkat kematian bayi pada kelompok 20% terbawah
3. Kemiskinan kepemilikan tanah, ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah persentase kepemilikan tanah dari kelompok 20% terbawah.
4. Akses terhadap infrastruktur, dengan ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah:
 - Akses dari kelompok 20% terbawah terhadap air bersih
 - Akses dari kelompok 20% terbawah terhadap sanitasi
 - Persentase dari desa tertinggal
5. Kerentanan terhadap kemiskinan material, dengan ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah:
 - Persentase kelompok yang rentan terhadap perubahan
 - Pengeluaran akibat guncangan
6. Kemiskinan relatif, dengan ukuran operasional kemiskinan yang digunakan adalah Indeks Gini

Ukuran-ukuran kemiskinan material (defisit konsumsi) lazim digunakan karena keunggulannya dalam melihat perbedaan kemiskinan dan pola-pola kemiskinan menurut sektor dan menurut grup. Salah satu ukuran operasional kemiskinan secara material yang lazim digunakan adalah garis kemiskinan (LPEM FEUI, 2001). Garis Kemiskinan (*Poverty Line*), yaitu suatu garis yang dipakai sebagai patokan dalam menentukan penduduk miskin maupun tidak miskin (Dumairy, 1996: 117).

Salah satu metode yang digunakan dalam mengukur kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) adalah Garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perdesaan dan perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Secara nasional garis kemiskinan terbagi kedalam garis kemiskinan perdesaan dan garis kemiskinan perkotaan. Setiap tahunnya garis kemiskinan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan. Tabel 1. menunjukkan perkembangan garis kemiskinan di Indonesia untuk periode 1996-2008.

Tabel 1
Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 1996-2008
(Rp/Kapita/Bulan)

Tahun	Kota	Desa
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)	(3)
1996	42.032	31.366
1997*	69.496	52.073
1998	96.959	72.780
1999	92.409	74.272

2000	91.632	73.648
2001	100.011	80.382
2002	130.499	96.512
2003	138.803	105.888
2004	143.455	108.725
2005	150.799	117.259
2006	174.290	130.584
2007	187.942	146.837
2008	204.896	161.831

Sumber: Statistik Indonesia, *data diolah
Badan Pusat Statistik, Jakarta

Garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan. Secara umum garis kemiskinan di perkotaan lebih besar nilainya dibandingkan garis kemiskinan yang ada di perdesaan. Untuk komposisi pengeluaran kebutuhan dasar minimum maka pengeluaran untuk garis kemiskinan makanan masih lebih besar daripada pengeluaran untuk garis kemiskinan non makanan (Azis, 2009).

Sedangkan Garis Kemiskinan berdasarkan Bank Dunia untuk periode tahun 1996-2008 ditunjukkan oleh tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2
Garis Kemiskinan Menurut Bank Dunia Tahun 1996-2008
(US\$/kapita-Rp/kapita)

Tahun	Garis Kemiskinan (US\$/kapita/hari)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/hari)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1996	1.00-2.00	2.883-5.766	86.490-17.980
1997	1.00-2.00	4.650-9.300	139.500-279.000
1998	1.00-2.00	8.029-16.058	240.870-481.740
1999	1.00-2.00	7.100-14.200	213.000-426.000
2000	1.00-2.00	9.595-19.190	287.850-575.700
2001	1.00-2.00	10.400-20.800	312.000-624.000
2002	1.00-2.00	8.940-17.880	268.200-536.400
2003	1.00-2.00	8.465-16.930	253.950-507.900
2004	1.00-2.00	9.290-18.580	278.700-557.400
2005	1.25-2.00	12.287,5-19.660	368.625-589.800
2006	1.25-2.00	11.275-18.040	338.250-541.200
2007	1.25-2.00	11.773,75-18.838	353.212,5-565.140
2008	1.25-2.00	13.687,5-21.900	413.625-657.000

Sumber: Bank Dunia, data diolah

Bank Dunia dalam menentukan garis kemiskinan tidak sama dengan penentuan garis kemiskinan di Indonesia, batas garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia melihat dari sisi pendapatan per kapita sedangkan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran

(dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan. Sejak tahun 1970-an Bank Dunia menggunakan standar mata uang dollar Amerika Serikat (AS) dalam menentukan garis kemiskinan. Bank dunia mengukur kemiskinan absolut dengan tidak tercapainya penghasilan sebesar US \$1.00 per hari (periode 1996-2004) sedangkan periode 2005 sampai dengan sekarang sebesar US \$ 1,25 per hari sedangkan untuk kemiskinan relatif bagi yang berpenghasilan diantara US \$1.00-\$2.00 per hari untuk periode 1996-2004 dan penghasilan sebesar US \$1,25-\$2.00 per hari untuk periode 2005 sampai dengan sekarang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode analisis yang akan digunakan adalah uji kausalitas Granger. Model kausal atau analisis sebab akibat pada dasarnya akan memperhatikan sebuah peristiwa tertentu atau lebih dan beberapa faktor lain yang mempunyai pengaruh, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peristiwa tersebut (Agung, 2001: 266). Granger Test digunakan untuk menguji adanya kausalitas antara dua variabel. Kekuatan prediksi (*predictive power*) dari informasi sebelumnya dapat menunjukkan adanya hubungan antara x dan y dalam jangka waktu lama (Kuncoro, 2004: 69). Model Granger test dinyatakan dalam bentuk regresi dalam persamaan (1), dan (2) sebagai berikut:

$$y = \sum_{i=1}^m \alpha y_{t-i} + \sum_{i=1}^m \beta_i x_{t-i} + u_{1t} \dots \dots \dots (1)$$

$$x = \sum_{i=1}^m \alpha x_{t-i} + \sum_{i=1}^m \delta y_{t-i} + u_{2t} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

y = Pertumbuhan Ekonomi

x = Jumlah Penduduk Miskin

u_{1t}, u_{2t} = Diasumsikan tidak saling berkorelasi

$t-j$ = Operasi kelambanan (lag/masa lalu)

Dalam penelitian ini, model kausalitas Granger disajikan untuk menguji hubungan antara jumlah penduduk miskin (JPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE), sebagai berikut:

$$PE_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i PE_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j JPMN_{t-j} + u_t \dots \dots \dots (3)$$

$$JPMN_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i JPMN_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j PE_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (4)$$

$$PE_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i PE_{t-1} + \sum_{j=1}^m \beta_j JPMJ_{t-j} + u_t \dots \dots \dots (5)$$

$$JPMJ_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i JPMJ_{t-1} + \sum_{j=1}^m \delta_j PE_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (6)$$

$$PE_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i PE_{t-1} + \sum_{j=1}^m \beta_j JPMLJ_{t-j} + u_t \dots \dots \dots (7)$$

$$JPMLJ_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i JPMLJ_{t-1} + \sum_{j=1}^m \delta_j PE_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (8)$$

Dimana :

PE_t	= Pertumbuhan Ekonomi
t	= Menunjukkan Waktu
JPM_t	= Jumlah Penduduk Miskin Nasional
$JPMJ_t$	= Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa
$JPMLJ_t$	= Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa
u_t dan v_t	= error terms yang diasumsikan tidak saling berkorelasi
$t - j$	= Operasi Kelambanan (lag/masa lalu)

Persamaan (1) menyatakan bahwa nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) sekarang dihubungkan dengan nilai masa lalu Jumlah Penduduk Miskin (JPM_t) dan nilai masa lalu Pertumbuhan Ekonomi (PE_t). Persamaan (2) menyatakan bahwa untuk variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) sekarang dihubungkan dengan nilai masa lalu Jumlah Penduduk Miskin (JPM_t) dan nilai masa lalu Pertumbuhan Ekonomi (PE_t).

Hasil persamaan (1) dan (2) menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, apabila hasil regresi dari persamaan (1) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) menyebabkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), jika $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ signifikan secara statistik. Demikian juga dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) menyebabkan variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) jika $\alpha \neq 0, \delta \neq 0$ signifikan secara statistik pada persamaan (2). Kemudian digunakan F-test untuk melihat apakah masing-masing variabel dalam persamaan tersebut berpengaruh secara signifikan untuk mengidentifikasi adanya kausalitas.

Dari uji tersebut di atas dapat dibedakan menjadi empat kasus sebagai berikut :

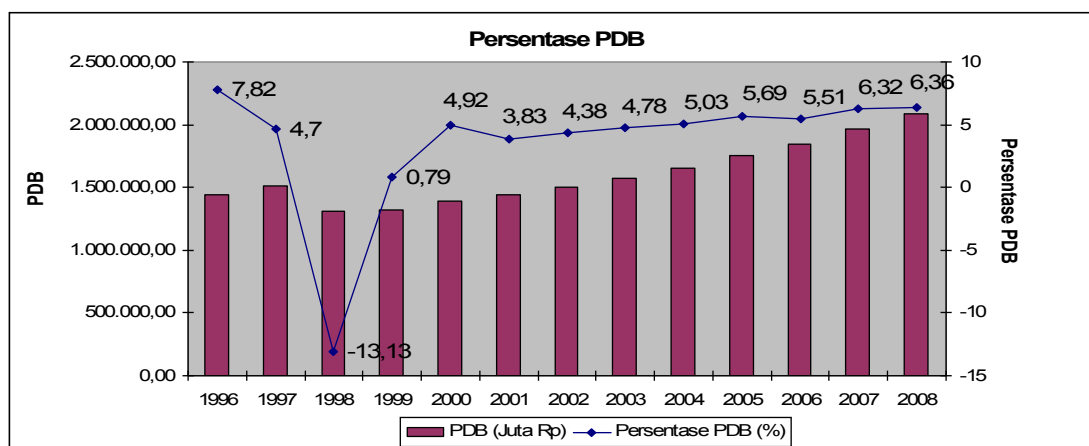
1. Kausalitas satu arah dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin terjadi, jika koefisien yang diestimasi pada masa lalu Pertumbuhan Ekonomi secara statistik tidak sama dengan nol atau (i. e. $\sum \alpha \neq 0, \sum \beta \neq 0$) dan jika koefisien yang diestimasi dari nilai masa lalu Jumlah Penduduk Miskin sama dengan nol (i. e., $\beta = 0$), dan sebaliknya.

2. Kausalitas satu arah dari Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi terjadi, jika koefisien yang diestimasi pada masa lalu Jumlah Penduduk Miskin secara statistik tidak sama dengan nol atau (i, e., $\sum \alpha \neq 0, \sum \beta \neq 0$) dan jika koefisien yang diestimasi pada masa lalu Pertumbuhan Ekonomi sama dengan nol (i, e., $\beta = 0$), dan sebaliknya.
3. Kausalitas dua arah, dapat dinyatakan terjadi bila koefisien pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin secara statistik tidak sama dengan nol dalam uji kedua persamaan tersebut secara regresi.
4. Pada akhirnya, independensi dapat dinyatakan bila koefisien pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin secara statistik tidak signifikan dalam kedua pengujian persamaan secara regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 1996-2008

Pada pertengahan tahun 1997, pondasi perekonomian mengalami guncangan hebat akibat krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter sehingga memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Persentase pertumbuhan ekonomi yang tinggi terguncang hingga merosot sangat tajam menjadi sekitar -13,13 persen (lihat gambar 2.) ditahun 1998 dengan capaian pertumbuhan ekonomi menjadi Rp.1.313.548,40 juta turun drastis dari PDB tahun sebelumnya yang sebesar Rp.1.512.028,19 juta. Krisis ini juga berimbas pada tingginya harga barang kebutuhan pokok yang melonjak drastis. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan yang pada masa sebelum krisis belum teratasi. Tahun 1999 pasca krisis yang melanda Indonesia, Produk Domestik Bruto berangsur-angsur mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar PDB meningkat menjadi sebesar Rp. 1.323.940,23 juta atau ada peningkatan Rp10.391,83 juta dengan pertumbuhan sebesar 0,79 persen. Pada masa setelah krisis ini sektor pertanian memberikan peningkatan kontribusi terhadap PDB yang disebabkan adanya perpindahan tenaga kerja sektor non-pertanian ke sektor pertanian.



Sumber: BPS dan BI, data diolah

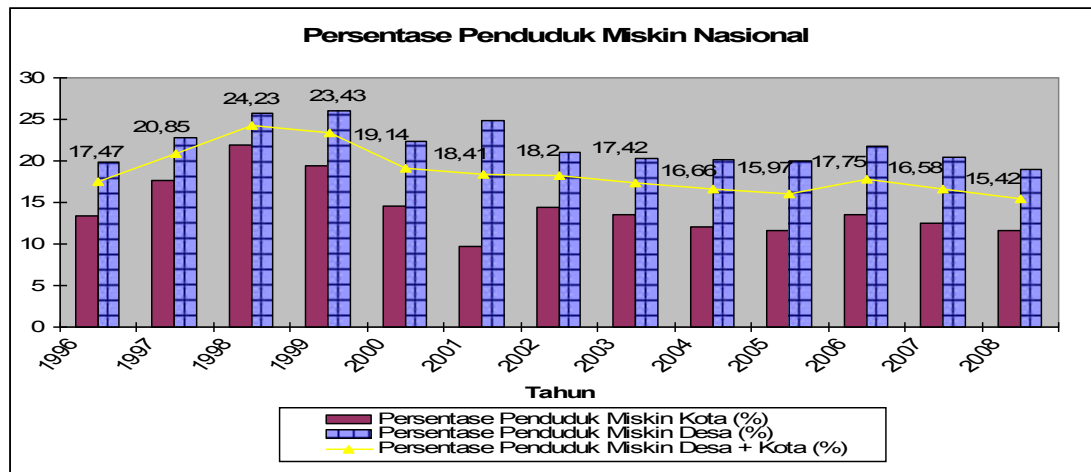
Gambar 2. Persentase PDB di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 1996-2008

Tahun 2008 yang memberikan kontribusi PDB tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 19,6 persen dari total PDB yang ada. Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDB Indonesia. Untuk PDB 2008, masing-masing yang memiliki sumbangan PDB cukup besar yaitu sektor industri dan pengolahan sebesar 27,2 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 14,7 persen.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Nasional di Indonesia

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh pemerintah guna mengurangi jumlah penduduk miskin. Baru pada Pelita VI pemerintah secara eksplisit secara tegas mengidentifikasi sasaran upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran ini, pemerintah menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Dimana jumlah penduduk miskin rata-rata relatif tetap tinggi bila dibandingkan jumlah penduduk sebelum periode 1996-2008 yaitu pada periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) dimana angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11%, hal ini didukung dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun selama periode itu. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1996 sebesar 34,01 juta jiwa dengan penyebaran penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,42 juta jiwa sedangkan di perdesaan sebesar 24,59 juta jiwa. Krisis moneter yang melanda di tahun 1997-1998 kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24,43% tahun 1998 sehingga dijadikan alasan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Tahun 1997 dan 1998, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan cukup besar sehingga berturut-turut jumlah penduduk miskin sebesar 41,76 juta jiwa (13,51 juta jiwa di perkotaan dan 28,25 juta jiwa di perdesaan) dan 49,5 juta jiwa (17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan). Hal ini disebabkan oleh krisis yang berawal di negara Thailand yang terjadi pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997 dimana nilai tukar baht Thailand terhadap dollar AS mengalami guncangan hebat akibat dari para investor asing mengambil keputusan “jual”. Ini mereka lakukan karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut (Tambunan, 2003: 27).



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Nasional Tahun 1996-2008

Dampak krisis moneter sangat dirasakan oleh penduduk miskin, PHK terjadi dimana-mana membuat ribuan pekerja formal dari golongan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah di kota-kota menjadi menganggur. Begitu pula yang terjadi dengan pekerja yang ada disektor informal sehingga mengakibatkan banyak diantaranya kembali ke desa masing-masing akibat dari krisis moneter ini. Selain itu, akibat lainnya dari krisis yang dirasakan masyarakat antara lain: penurunan daya beli, kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal, penurunan porsi pengeluaran kebutuhan pangan, penurunan tingkat kesehatan dan pendidikan serta peningkatan tingkat keresahan sosial baik di tingkat keluarga maupun tingkat masyarakat (Bappenas, 2000).

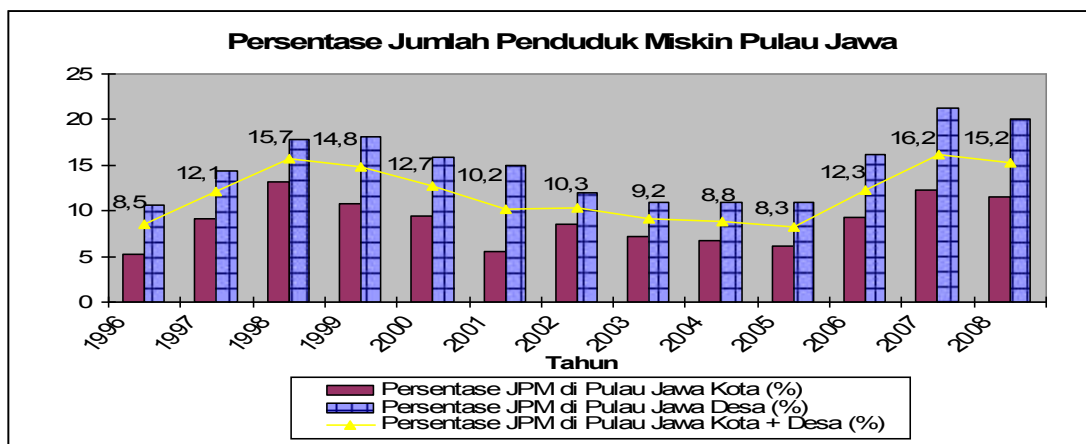
Pada periode 1999-2008 seiring dengan perekonomian yang berangsur-angsur pulih yang dikarenakan membaiknya kondisi makroekonomi nasional, jumlah penduduk miskin dari tahun-ketahun mengalami penurunan. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup berarti dimana 0,13 juta jiwa penduduk miskin berkurang di tahun ini, baik jumlah penduduk miskin perkotaan maupun yang ada perdesaan ikut mengalami penurunan dengan jumlah masing-masing sebesar 13,56 untuk perkotaan dan 23,61 untuk

perdesaan. Penurunan kembali terjadi di tahun 2008 dengan jumlah penduduk miskin yang menjadi 34,96 juta jiwa (12,77 juta jiwa di perkotaan dan 22,19 juta jiwa di perdesaan).

Walaupun selama dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun kedepan tantangan yang lebih besar masih akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia yaitu bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin dengan ukuran garis kemiskinan nasional dan lebih tinggi lagi dengan menggunakan ukuran bank dunia yaitu US \$1.00-2.00 per kapita per hari. Bila menggunakan ukuran yang dipakai oleh bank dunia maka di Indonesia penduduk yang hidup di dekat garis kemiskinan nasional sangat rentan terhadap kemiskinan. Artinya jumlah penduduk miskin di Indonesia akan semakin besar bila mengacu pada ukuran garis kemiskinan bank dunia. Mereka yang berada di dekat garis kemiskinan nasional merupakan orang-orang yang rentan apabila terjadi guncangan ekonomi dan dapat dengan mudah jatuh menjadi golongan penduduk miskin dengan pendapatan dibawah US\$1.00 per kapita per hari.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa atau sekitar 57,4 persen dari total penduduk miskin berada di pulau Jawa. Penduduk miskin pulau Jawa terutama berada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Jawa sebagai pusat kemiskinan di Indonesia erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduk yang memang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sehingga ada korelasi positif antara tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan seperti yang dikemukakan Malthus. Semakin tinggi jumlah penduduk per km² atau per hektar, maka semakin sempit ladang untuk bertani atau semakin kecil kesempatan kerja dan semakin banyak orang yang tidak dapat penghasilan yang cukup, yang artinya semakin besar persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.



Su

mber: BPS, data diolah

Gambar 4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 1996-2008

Pulau Jawa merupakan wilayah yang relatif maju dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi wilayah ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja (atau pengurangan tingkat pengangguran) dan defisit neraca pembayaran dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Pada awalnya pembangunan di pusatkan untuk sektor-sektor yang potensial dan hanya di pulau Jawa. Karena itulah adanya ketimpangan seperti yang dikemukakan Kuznets. Di masa sebelum krisis, proses perbaikan kesejahteraan penduduk di perdesaan lebih baik dibandingkan perkotaan karena walaupun secara absolut jumlah penduduk miskin pulau Jawa di perdesaan lebih banyak, namun penurunannya dalam persentase mampu menyamai di daerah perkotaan. Akan tetapi setelah krisis disaat pembangunan tidak lagi berorientasi pada industrialisasi maka jumlah penduduk miskin bertambah dibandingkan pada masa sebelum krisis.

Jumlah penduduk miskin di pulau Jawa untuk tahun 1996 sebesar 19,3 juta jiwa (6,7 juta jiwa di perkotaan dan 12,4 juta jiwa di perdesaan). Tahun 1997 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mengalami penurunan menjadi sebesar 19,2 juta jiwa dengan penyebaran penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,0 juta jiwa sedangkan di perdesaan sebesar 12,1 juta jiwa. Selanjutnya di tahun 1998, jumlah penduduk miskin yang berada di pulau Jawa masih sebesar 19,92 juta jiwa (7,2 juta jiwa di perkotaan dan 11,8 juta jiwa di perdesaan).

Namun sebaliknya, akibat krisis, jumlah penduduk miskin pulau Jawa baik di perkotaan maupun perdesaan naik drastis seperti yang ditunjukkan pada tabel 11. di atas. Hal ini tercermin pada angka jumlah penduduk miskin pasca krisis yang melanda Indonesia yaitu

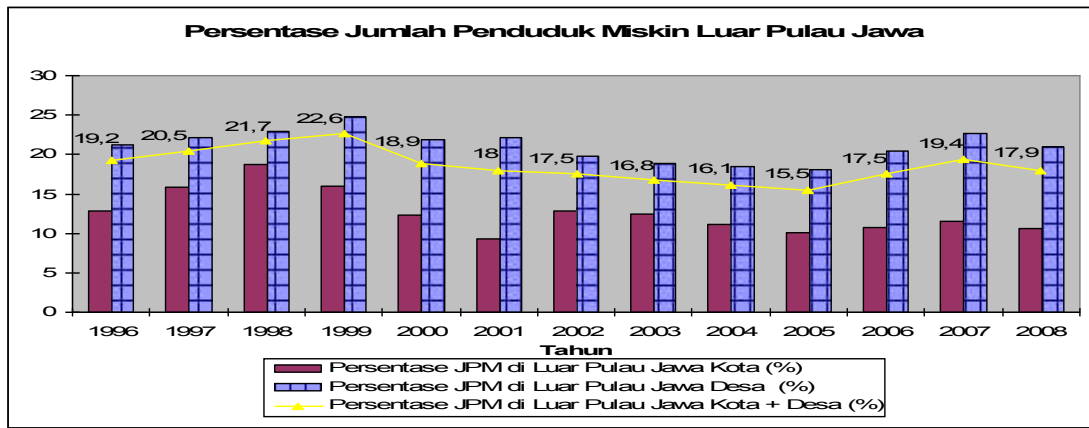
pada tahun 1999 dimana jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mengalami peningkatan yang cukup tajam sehingga menjadi sebesar 28,6 juta jiwa di tahun 1999 dengan pertumbuhan sebesar 50,5 persen. Sebanyak 14,8 persen penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin yang berdomisili di pulau Jawa.

Tahun 2008 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mengalami penurunan menjadi sebesar 20,0 juta jiwa (8,6 juta jiwa di perkotaan dan 11,4 juta jiwa di perdesaan). Terjadi pengurangan penduduk miskin sebanyak 1,1 juta jiwa dengan persentase 15,2 persen yang berarti dari seluruh total penduduk Indonesia sebanyak 15,2 persen merupakan penduduk miskin yang berada di pulau Jawa.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berada di luar pulau Jawa sekitar 42,6 persen dari total penduduk miskin Indonesia, sisanya sebesar 57,4 tersebar di pulau Jawa. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan luar Pulau Jawa, daerah terpencil dan daerah perbatasan menyebabkan jumlah penduduk miskin luar Pulau Jawa masih terkonsentrasi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Tepatnya sekitar 63,5 persen penduduk miskin luar Pulau Jawa hidup di daerah perdesaan. Jika melihat secara persentase terhadap jumlah penduduk daerah tersebut, maka kemiskinan di luar pulau Jawa berada di daerah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin harus diupayakan di daerah-daerah tersebut.

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar) serta banyaknya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin baik karena guncangan ekonomi (berada di posisi dekat dengan garis kemiskinan sehingga dengan adanya guncangan ekonomi masuk menjadi penduduk miskin), bencana alam, hal ini menyebabkan lambatnya pencapaian penurunan kemiskinan di luar pulau Jawa, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah digulirkan di wilayah ini. Fluktuasi harga kebutuhan barang pokok akibat inflasi, berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Makin meningkatnya harga kebutuhan pokok tersebut mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan berkurang, sehingga masyarakat menjadi semakin banyak yang berada di bawah garis kemiskinan untuk wilayah luar pulau Jawa.



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa
Tahun 1996-2008

Pada pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1998, terjadi krisis yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di luar pulau Jawa. Untuk tahun 1997 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,5 juta jiwa dengan penyebaran penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 3,6 juta jiwa sedangkan di perdesaan 12,9 sebesar juta jiwa. Selanjutnya di tahun 1998, jumlah penduduk miskin yang berada di luar pulau Jawa masih sebesar 17,5 juta jiwa (4,3 juta jiwa di perkotaan dan 13,1 juta jiwa di perdesaan) terjadi peningkatan kembali untuk jumlah penduduk miskin di luar pulau Jawa di tahun ini.

Hingga tahun 1999 Jumlah penduduk miskin di luar pulau Jawa masih mengalami peningkatan yang cukup tajam sehingga yaitu sebesar 19,4 juta jiwa dengan persentase sebesar 22,6 persen. Pada tahun 2008 terjadi penurunan penduduk miskin hingga menjadi sebesar 15,0 juta (4,3 juta jiwa di perkotaan dan 10,8 juta jiwa di perdesaan) dengan persentase 17,9 persen yang artinya dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, sebanyak 17,9 persen adalah penduduk miskin yang tinggal diluar pulau Jawa.

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di wilayah luar pulau Jawa diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Salah satu kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah ini yaitu program PNPM Mandiri (tahun 2008) yang diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM di perluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIPIP).

Analisis Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi uji kausalitas Granger untuk Jumlah Penduduk Nasional (JPMN) sebagai variabel dependen, dengan melihat uji F dimana F-statistik dengan nilai sebesar 0,83558 lebih kecil dari nilai F (kritis) atau F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$, yaitu sebesar 4,84 ($0,83558 < 4,84$), artinya hipotesis nol (H_0) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger tidak menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) diterima dan H_a yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) ditolak.

Tabel 3
Hasil Pengujian Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan
Jumlah Penduduk Miskin Nasional

Hipotesis nol (H_0)	Hubungan Jangka Pendek	
	F-statistik	Prob.
PE \Rightarrow JPMN	0.83558	0.38450
JPMN \Rightarrow PE	0.46253	0.51355

Sumber: Hasil Olahan Program Eviews

Selanjutnya untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen, maka F-statistik dengan nilai sebesar 0,46253 lebih kecil dari F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$, yaitu 4,84 ($0,46253 < 4,84$), artinya bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) secara Granger tidak menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) diterima dan H_a yang menyatakan Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) ditolak. Untuk definisi mempengaruhi dalam versi *granger causality* ini adalah bahwa informasi masa lalu dan masa kini Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak bisa secara signifikan menjelaskan nilai sekarang dari Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN). Hal ini diartikan bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin nasional bukan merupakan hasil atau efek dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dari hasil uji kausalitas Granger diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) di Indonesia dan sebaliknya antara Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) juga tidak memiliki hubungan kausalitas. Tidak adanya hubungan kausalitas dari JPMN ke PE dan dari PE ke JPMN bukan berarti keduanya tidak bisa dibentuk ke dalam satu persamaan fungsional yang menghubungkan antara keduanya. Akan tetapi besar kemungkinan persoalan yang terjadi tidak berada pada aspek arah kausalitas melainkan pada aspek endogenitas atau variabel yang mempengaruhi jumlah

penduduk miskin nasional selain dari pertumbuhan ekonomi seperti akses pada pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pemerataan dalam distribusi aset dan lain sebagainya. Dengan demikian kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin nasional dengan hanya melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak cukup tepat untuk kasus di Indonesia.

Analisis Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi uji kausalitas Granger untuk Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) sebagai variabel dependen, maka dilihat dari uji F dimana F-statistik dengan nilai sebesar 3,19304 lebih kecil dari nilai F(kritis) atau F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$, yaitu sebesar 4,84 ($3,19303 < 4,84$), artinya hipotesis nol (H_0) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger tidak menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) diterima, sedangkan H_a yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) ditolak.

Tabel 4
Hasil Pengujian Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa

Hipotesis nol (H_0)	Hubungan Jangka Pendek	
	F-statistik	Prob.
PE \Rightarrow JPMJ	3.19304	0.10760
JPMJ \Rightarrow PE	1.99746	0.19120

Sumber: Hasil Olahan Program Eviews

Selanjutnya untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen, maka dengan menggunakan uji F dimana F-statistik dengan nilai sebesar 1,99746 lebih kecil dari F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$, yaitu 4,84 ($1,99746 < 4,84$), artinya hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) secara Granger tidak menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) diterima dan H_a yang menyatakan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) ditolak. Untuk definisi mempengaruhi dalam versi *granger causality* ini adalah bahwa informasi masa lalu dan masa kini dari pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjelaskan secara signifikan nilai sekarang dari jumlah penduduk miskin pulau Jawa. Hal ini diartikan bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin pulau Jawa bukan merupakan hasil atau efek dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dari hasil pengujian kausalitas Granger yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin pulau Jawa. Tidak adanya hubungan kausalitas dari JPMJ ke PE dan dari PE ke JPMJ bukan berarti keduanya tidak bisa dibentuk ke dalam satu persamaan fungsional yang menghubungkan antara keduanya. Akan tetapi besar kemungkinan persoalan yang terjadi tidak berada pada aspek arah kausalitas melainkan pada aspek endogenitas atau variabel yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin pulau Jawa selain dari pertumbuhan ekonomi seperti akses pada pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin pulau Jawa, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pemerataan dalam distribusi aset dan lain sebagainya. Dengan demikian kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pulau Jawa dengan hanya melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak cukup tepat untuk kasus di Indonesia.

Analisis Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi uji kausalitas Granger untuk Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) sebagai variabel dependen, maka dengan melihat uji F atau F-statistik dengan nilai sebesar 1,17142 lebih kecil dari nilai F (kritis) atau F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$, yaitu sebesar 4,48 ($1,1742 < 4,84$), artinya hipotesis nol (H_0) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger tidak menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) diterima dan H_a yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) ditolak.

Tabel 5
Hasil Pengujian Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan
Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa

Hipotesis nol (H_0)	Hubungan Jangka Pendek	
	F-statistik	Prob.
PE \Rightarrow JPMLJ	1.17142	0.30726
JPMLJ \Rightarrow PE	0.11165	0.74593

Sumber: Hasil Olahan Program Eviews

Kemudian untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen, maka dengan melihat uji F dimana F-statistik dengan nilai sebesar 0,11165 lebih kecil dari F-tabel pada $\alpha = 5$ persen $df=11$ yaitu 4,84 ($0,11165 < 4,84$), artinya hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) secara Granger tidak

menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) diterima, dan H_a yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara Granger menyebabkan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau (JPMLJ) ditolak. Sedangkan untuk definisi mempengaruhi dalam versi *Granger Causality* ini adalah bahwa informasi masa lalu dan masa kini dari pertumbuhan ekonomi tidak bisa secara signifikan menjelaskan nilai sekarang jumlah penduduk miskin pulau luar pulau Jawa. Hal ini diartikan bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa bukan merupakan hasil atau efek dari peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil uji kausalitas Granger diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) di Indonesia dan sebaliknya antara Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) juga tidak memiliki hubungan kausalitas. Tidak adanya hubungan kausalitas dari JPMLJ ke PE dan dari PE ke JPMLJ bukan berarti keduanya keduanya tidak bisa dibentuk ke dalam satu persamaan fungsional yang menghubungkan antara keduanya. Akan tetapi besar kemungkinan persoalan yang terjadi tidak berada pada aspek arah kausalitas melainkan pada aspek endogenitas atau variabel yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa selain dari pertumbuhan ekonomi seperti akses pada pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di luar pulau Jawa, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pemerataan dalam distribusi aset dan lain sebagainya. Dengan demikian kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa dengan hanya melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak cukup tepat untuk kasus di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak mampu mengurangi Jumlah Penduduk Miskin Nasional (JPMN), Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (JPMJ) dan Jumlah Penduduk Miskin Luar Pulau Jawa (JPMLJ). Hasil pengujian *Granger-Causality Test* membuktikan bahwa perubahan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin nasional, jumlah penduduk miskin pulau Jawa dan jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa. Begitu juga sebaliknya setiap penurunan jumlah penduduk miskin nasional, jumlah penduduk miskin pulau Jawa dan Jumlah penduduk miskin luar pullau Jawa tidak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga antara pertumbuhan ekonomi dengasn jumlah penduduk miskin nasional, jumlah penduduk miskin pulau Jawa dan jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa tidak mempunyai hubungan kausalitas. Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil regresi

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin nasional, jumlah penduduk miskin pulau jawa dan jumlah penduduk miskin luar pulau Jawa pada taraf $\alpha = 5\%$.

Saran

Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penduduk miskin dengan melihat faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhinya, agar implementasi kebijakan tepat pada sasaran yaitu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Reformasi dan pembenahan masalah kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi kemiskinan atau mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia sangat diperlukan. Pemerintahan yang baik (*good governance*) turut mendukung penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, reformasi kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan perlu juga dibenahi untuk pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia khususnya untuk penduduk miskin yang ada di luar pulau Jawa. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan program bantuan modal usaha yang tepat guna dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maju serta peningkatan program bantuan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur guna mencapai tujuan pengurangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, I Gusti Ngurah., 2001, *Statistika: Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Sritua., 1998, *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- _____, 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Arsyad, Lincolin., 2004, *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan J., 2009, *Macro Stability can be Detrimental to Poverty*, Economics and Finance in Indonesia Vol 57(1), Page 1-23 (<http://www.lpem.org/admin/upload/File/publication/EKI%20Vol%2057%20No.1.pdf>, diakses 20 Mei 2009).
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta, Berbagai Edisi, *Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 1: Provinsi 1996-200*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Berbagai Edisi, *Statistik Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-2008*, BPS, Jakarta.
- Balisacan, A.; E.M. Pernia; dan A. Asra., 2003, *Revisiting Growth and Poverty in Indonesia: What do Subnational Data Show?*, Buletin of Indonesian Economic Studies Volume 39, Issue 3. Desember 2003. Pages 329-351.

- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan*, www.bi.go.id.
- Bappenas, 2000, *Konsep Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Proenas 2000-2001*, Makalah dalam diskusi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tingkat Pusat, Jakarta 13 Juni 2000.
- _____, 2000, *Program Pembangunan Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Makalah dalam diskusi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tingkat Pusat, Jakarta 13 Juni 2000.
- Braithwaite, Jeamine; Mont, Daniel., 2008, *Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications*, Social Protection & Labor Discussion Paper, No.0805, World Bank, (<http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1172608138489/WBPovertyAssessments.pdf>, diakses 14 Juni 2009).
- Besley, Timothy, and Robin Burgess., 2003, *Halving Global Poverty*, Journal of Economic Perspectives, vol. 17(3):3-22 (<http://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/jep11.pdf>, diakses 20 Juli 2009).
- Boediono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Budianto, Aris., 2008, *Analisis Kemiskinan di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan), Palembang..
- Dollar, David; Kraay, Aart., 2002, *Growth Is Good for the Poor*, Journal of Economic Growth, Development Research Group, World Bank, March 2002, 7: 195-225.
- Dumairy, Drs, MA.,1996, *Perekonomian Indonesia*, PT Erlangga, Jakarta.
- Dutt, Amitava Krishna; Ros, Jaime., 2003, *Development Economics and Structural Macroeconomics*, Edward Elgar Publishing, USA.
- Grabowski, Richard; Shields, Michael P., 1996, *Developments Economics*, Blackwell Business, USA.
- Gujarati, Damodar, 1995., *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hakim, Abdul., 2004, *Ekonomi Pembangunan*, EKONISIA, FE UII, Yogyakarta.
- Hondai, Susumu., 2005, *Profile of Poverty and Probability of Being Poor in Rural Indonesia*, The International Centre for study of East Asian Development, Working Paper Series Vol. 2005-16.
- Irawan; Suparmoko, M., 1995, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Kelima, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L., 2007, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar., 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Kuncoro. Mudrajat., 2000, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Leinbach, Thomas R., 2004, *The Indonesia Rural Economy: Mobility, Work and Enterprice*, Institute of Southeast Asian Studies, Siangapore.
- Lembaga Penelitian Smeru, 2008, *Peta Kemiskinan Indonesia: Asal Mula dan Signifikansinya*, Smeru Newsletter No. 26, May-Aug/208, Jakarta Indonesia.
- LPEM FEUI, 2001, *Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Manshur SE, MA, Agus; Sutikno SE; Iswono SE, Trikawan Jati, 2005, *Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2005, Jakarta.

- Mubyarto, 2002, *Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Rakyat.
- Page, John., 2006, *Strategies for Pro-Poor Growth: Pro-Poor, Pro-Growth or Both?* The World Bank, Journal of African Economies, Vol 15, Number 4, Page 510-542.
- Ray, Debraj., 1998, *Development Economics*, Princeton University Press, New Jersey, USA.
- Siregar, Hermanto; Wahyuniarti, Dwi., 2007, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, Kajian Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.
- Sitepu, Rasidin K; Sinaga, Bonar M., 2003, *Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institute Pertanian Bogor, ([http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(6\)%20soca-rasidin%20dan%20bonar%20s-cge\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(6)%20soca-rasidin%20dan%20bonar%20s-cge(1).pdf), diakses 1 Mei 2009)
- Sukirno, Sadono., 2006, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi ketiga, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1985, *Makro Ekonomi*, Grafindo, Jakarta.
- Sumodiningrat, 2000, *Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Forum Agro Ekonomi, (www.smecda.com/deputi7/file_makalah/02_08, diakses 20 Mei 2008).
- Tambunan, Tulus TH., 2003, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Kasus Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Todaro, Michael P; Smith, Stephen C., 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Urip, Sunaryo., 2008, *Perkembangan Jumlah penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, (http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK1.pdf, diakses 9 Juli 2009).
- Usman, Husaini; Akbar, Purnomo Setiady., 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wijayanti, Diana; Wahono, Heri., 2004, *Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Hal 215-225 (<http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/611/537>, diakses 10 Juli 2009).
- Wiranto, Tatag., *Profil Kemiskinan di Perdesaan*, Info URDI Vol. 14, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah, Bappenas.
- World Bank, 2006, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, The World Bank Office, Jakarta, Indonesia (<http://go.worldbank.org/P17WC69191>, diakses 9 Mei 2009).
- Yustika, Erani Ahmad., 2002, *Pembangunan Dan Krisis: "Memetakan Perekonomian Indonesia*, Grasindo, Jakarta.